

POLITIK KEKERABATAN

Dewi Anggariani

Jurusan Sosologi Agama
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Jalan Sultan Alauddin No. 36 Gowa
E-mail: anggariani67dewi@yahoo.co.id

Abstract;

Human being is 'zoon politicon' and human being lives to get involved in politics. This classic statement by Aristotles is still relevant to relate to the political system within the community today. Political structure was established to enhance and to fulfill all needs of human life. Due to this, political system may be applied to all walks of life. For common people, political structure is mainly based on family tree and bloodlines.

Keywords;

Politik- Kekerabatan- Keluarga

I. Pendahuluan

Memasuki abad ke 20 antropologi politik dikembangkan untuk mengatasi berbagai macam gejolak kaum terjajah di Negara jajahan dunia ke tiga. Untuk mengatasi berbagai macam kesulitan yang dihadapi dibutuhkan berbagai macam jenis persenjataan, namun usaha tersebut sepenuhnya belum berhasil. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan baru yaitu pendekatan sosial budaya. Negeri Aceh Darussalam misalnya selama ratusan tahun tidak mampu ditaklukan dengan cara kekerasan oleh Belanda. Sehingga memerlukan seorang jasa Snouk Hurgronje yang diutus secara rahasia dan menyamar sebagai seorang muslim untuk mempelajari agama dan sosial budaya setempat selama beberapa tahun, lalu memberikan rekomendasi bagaimana melumpuhkan perlawanan bangsa Aceh. Akhirnya perlawanan bangsa Aceh itupun dapat dikalahkan.

Para antropolog melanjutkan tradisi studi politiknya walaupun Negara-negara jajahan tersebut sudah merdeka. Kajian politik dimaksudkan untuk memahami berbagai bentuk dan struktur politik yang berlaku pada kelompok masyarakat komunal terutama di wilayah Afrika. Salah satu ciri khas dari system politik itu adalah peran kekerabatan dalam dalam membangun struktur politik. Politik kekerabatan ternyata tidak hanya terdapat pada masyarkat komunal pedesaan tetapi dapat pula dijumpai pada masyarakat perkotaan dan salah satu aspek terpenting dalam kekerabatan adalah politik keluarga.

Untuk mengembangkan kajian antropologi politik, telah dilakukan pendekatan-pendekatan pada obyek yang dianggap penting. Dari sekian kajian yang

dipandang penting adalah hubungan antara politik dengan kepercayaan, politik dengan ekonomi, dan politik dengan keekerabatan. Tulisan ini mengulas tentang hubungan politik dengan keekerabatan.

II. Keekerabatan

Dalam kehidupan sosial, interaksi antar masyarakat manusia yang membangun relasi baik relasi, ekonomi politik dan sosial budaya dipandang dari sudut wilayah tempat tinggal digolongkan dalam dua kelompok. Yaitu : masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dalam satu kelompok keekerabatan berdasarkan ikatan atau klen keluarga. Anak-anak setelah kawin mengawin akan membuat rumah tempat tinggal dilahan milik keluarga atau orang tua yang tentu berdekatan dalam satu komunitas. Interaksi sosial yang berlangsung secara intensif akan melahirkan perasaan sentiment komunitas yang memiliki unsur-unsur antara lain ; seperasaan, sepenaggungan dan saling memerlukan¹

Proses interaksi yang berlangsung terus menerus, membuat setiap individu mengenal keseluruhan anggota komunitasnya secara mendetail. Perasaan berduka atau bersuka cita seseorang akan dirasakan pula oleh anggota komunitas yang lain, ini pula yang mendorong mereka untuk bergegas membantu dan tolong menolong meringankan bebabn anggotanya. Setiap individu sangat tergantung kepada kelompok komunitasnya, sehingga dalam kelompok komunitas masyarakat pedesaan seorang individu rela berkorban untuk kebutuhan dan kepentingan kelompoknya.

Berbeda dengan masyarakat desa, masyarakat kota sangat kompleks. Di suatu lokasi pemukiman terdapat berbagai macam warga dengan latar belakang etnik dan sosial budaya yang heterogen *urban komunity*. Masyarakat urban pada umumnya terbentuk atas dasar keinginan untuk mendapat kehidupan yang layak, serta hiruk pikuk kota yang menyediakan berbagai macam layanan jasa dan hiburan. Walaupun demikian masyarakat urban juga memiliki kelompok keekerabatan yang terbentuk berdasar asal daerah atau suku. Orang Bugis Makasar misalnya, memiliki organisasi keekerabatan diseluruh propinsi di Indonesia (Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan). Demikian pula dengan kelompok keekerabatan yang terdapat di Kota Makassar terbentuk berdasarkan kelompok komunitas asal daerah baik dari kabupaten se-Sulawesi Selatan maupun dari propinsi lain.

Komunitas masyarakat desa dan kelompok masyarakat kota dalam hubungan interaksi sosialnya di gambarkan oleh F.Tonnies dengan istilah *gemeinschaft* untuk masyarakat desa dan *gesellschaft* untuk masyarakat kota.² Dalam istilah yang lain kedua model masyarakat tersebut yang oleh Emile Durkheim di sebut solidaritas mekanik untuk masyarakat desa dan solidar organic untuk masyarakat kota.

¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada, 2007.h.134

² Kontjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta,2009, h.127

Durkheim kemudian menjelaskan implikasi cara kerja solidaritas mekanik dan solidaritas organik sebagai berikut³:

	Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
Masyarakat- Pembagian kerja	Tradisional Rendah	Modern Tinggi
	Generalisasi	Spesialisasi
Sifat Hukum	Represif	Restitutif
Kesadaran Kolektif	Tinggi	Rendah
Aksentuasi	Persamaan	perbedaan
	Kolektif	Individu

Pembagian kerja pada masyarakat organik jabatan atau posisi bersifat umum, yakni mampu nyai tugas yang luas serta tanggung jawab dalam jumlah yang besar. Tugas dan tanggung jawab dapat dijalankan di semua bidang, ini disebabkan karena kesadaran terhadap pembagian kerja belum berkembang sehingga cenderung *bekerja bersama-sama dari pada bekerja sama*.

Dalam bidang penegak hukum, masyarakat solidaritas mekanik cenderung menyukai hukum yang bersifat represif. Masing-masing orang memiliki dan memegang teguh moralitas kolektif, jika terdapat pelanggaran terhadap moralitas bersama tersebut menjadi sensitive. Pelanggaran hokum moral kolektif itu akan mendapat sanksi yang represif. Pencuri misalnya akan mendapat hukuman pengusiran hingga terisolasi dari anggota komunitasnya. Pengawasan hukum dilakukan secara bersama. Karena pola pengorganisasian masyarakat mekanik bersifat umum tanpa perbedaan, serta komit terhadap moral politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa *gemeinschalft* mengutamakan interaksi atau hubungan karib, sedangkan *geselschalft* mengutamakan hubungan berguna. Hubungan karib berlangsung secara intensif yang sifat interaksinya tulus dan tanpa pamrih. Sedangkan *geselschalft* intensitas hubungannya didasarkan atas kepentingan atau keuntungan yang diperoleh.

Solidaritas mekanik pada masyarakat desa yang dikemukakan oleh Durkheim tidak berarti dalam masyarakat perkotaan sama sekali tidak terdapat solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik yang terbangun pada masyarakat kota berbentuk kelompok kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, perkawinan dan etnik seperti perkumpulan arisan dan lain-lain.

III. Antropologi dan Tradisi Politik

Dalam antropologi politik studi politik lebih ditujukan pada pembahasan tentang kekuasaan politik dalam konteks sosial budaya. Disini aspek politik berada pada berbagai bidang kebudayaan, sekaligus arena pengungkapan hubungan politik yang dikerahkan secara sosial. Bahkan antropologi politik mencakup politik pada klasifikasi kekuasaan mulai dari politik suku atau komunal hingga politik Negara.

³ Zainuddi Maliki. *Narasi agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya. LPAM 2003, h.90

Antropolog Edmun Lech bahkan menyebut “setiap perubahan sosial dan cultural merupakan pencarian politik”.⁴ Studi politik dalam antropologi dimulai dengan penelitian terhadap masyarakat di dunia ke tiga terutama di Afrika. Pada tahun 1940 terbit buku dengan judul *African Political systems* yang ditulis oleh Fortes dan Evans Prichart⁵. Walaupun studinya terfokus pada perilaku politik, system kekerabatan dalam praktek politik:

Pertama, tipe yang menunjukkan kepada masyarakat yang mempunyai kekuasaan terpusat, hirarki administratif, lembaga hukum ditetapkan dengan jelas. Struktur, kelas dan perilaku politik menurut gambaran teritorial. Struktur administrative berisikan struktur politik dan karenanya memiliki sebuah pemerintahan yang menyerupai Negara. Dalam struktur kekuasaan tugas dan wewenang politik tertata dengan rapi mulai dari tingkat tertinggi sampai pada struktur kelompok yang paling rendah/kecil.

Kedua, tipe kedua adalah system politik dengan struktur politik yang tidak mempunyai kekuasaan pusat, mesin administratif atau pengadilan dengan kekuasaan untuk menjatuhkan keputusan tidak tertata dengan jelas, dimana dalam struktur politik tugas dan wewenang tidak tertata secara rapi sehingga kadang disebut masyarakat tak bernegara. Dalam masyarakat seperti ini garis keturunan dipergunakan sebagai kerangka satuan politik, sehingga perilaku politik terikat sangat kuat dengan dan tercakup oleh system pertalian keluarga.

Ketiga, tipe ketiga adalah kelompok komunitas kecil yang keseluruhannya dipersatukan oleh ikatan kekeluargaan, kelompok masyarakat tersebut terbentuk berupa gerombolan keluarga atau keluarga pengembara yang hidupnya kadang berpindah dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan ketersediaan makanan, baik makanan untuk kebutuhan kelompok maupun makanan untuk kebutuhan ternak.

Evans Prichart dalam penelitiannya tentang struktur politik bangsa Nuer di Sudan, dia menemukan bahwa struktur politik bangsa Nuer sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang berkaitan dengan ekologi⁶. Dalam Analisisnya tentang mata pencaharian dengan lingkungan alam tempat tinggal, kondisi geografis bangsa Nuer menyebabkan mereka menyebar di suatu daerah yang luas. Jika tiba musim hujan bangsa Nuer menetap di desa karena tersedia air dan rumput yang cukup untuk ternak. Sedangkan jika musim kemarau tiba bangsa Nuer meninggalkan desa-desa mereka dan tinggal diperkemahan dimana terdapat rumput dan air yang cukup untuk ternak.

Semakin besar kelompok pengembara, ikatan kekerabatannya cenderung melemah karena dalam setiap kelompok kecil bersaing secara politik untuk menguasai air dan rumput untuk ternak. Semakin kecil kelompok pengembara semakin kuat ikatan kesatuan mereka. Keadaan itu menunjukkan struktur sosial

⁴⁴ Frank Mc.Glynn dan Athur Tuden. *Anthropological Aproches to Political Behaviour*. Terjemahan oleh Suwargono dan Nugroho ; *Pendekatan Antropologi pada perilaku Politik*. Jakarta. UI Press 2000, h.3

⁵ Ibid, h.13

⁶ H.J.M.Claessen. *Anthropologie, Een Terrainverkenning*. Terjemahan oleh R.G.Soekadijo. *Antropologi Politik : Suatu orientasi*. Jakarta. Erlangga, 1987. h.7

mereka didasarkan atas lineage, yaitu kelompok kekerabatan yang unilineal , dimana silsilah keturunan dapat diketahui dengan jelas.⁷

IV. Keluarga dan Politik

Keluarga dalam pengertian antropologi adalah suatu jenis kelompok kekerabatan, istilah lainnya sering disebut kelompok persaudaraan, kolektivisme dan komunalisme. Suatu suasana sosial dimana semua kelompok merasa berkerabat dalam suatu hubungan kekeluargaan.⁸

Keluarga dan politik dalam kebudayaan universal dikelompokkan dalam organisasi sosial. Sehingga antara keluarga dan politik memiliki relasi yang cukup untuk saling mempengaruhi. Posisi politik seseorang atau kelompok tertentu ditentukan oleh koneksi keluarga yang kuat. Keluarga memiliki peran melahirkan seorang pemimpin politik dengan berbagai macam bentuk dukungan baik dalam bentuk dana maupun moril psikologis.

Presiden Prancis yang berkuasa di tahun 1970-an Giscard d'Estaing semasa di bangku kuliah adalah seorang mahasiswa yang cerdas , aktivis yang karirnya melonjak pesat hingga menjadi orang nomor satu di Prancis. Rakyat Prancis terkagum-kagum melihat sepak terjang sang pemimpin yang begitu cemerlang, bagaimana mungkin seorang mahasiswa biasa tiba-tiba menjadi seorang pemimpin bangsa Prancis. Ternyata keluarganya memiliki dua puluh perusahaan besar di Prancis, ia juga beristrikan cucu seorang pengusaha raja baja terkenal di dunia⁹. Kasus ini menunjukkan suatu hubungan yang erat antara kekuatan politik dengan ikatan dan koneksi keluarga kaya raya.

Pemimpin politik sebagai suatu kedudukan dapat saja terjadi pada setiap individu, baik melalui kedudukan atau status yang diusahakan maupun kedudukan atau status yang digariskan. Kedudukan yang diusahakan adalah kedudukan yang dicapai dengan melalui proses dan usaha yang panjang dan berliku. Sedangkan status yang digariskan, kedudukan dapat diperoleh karena diwariskan bahkan dilimpahkan oleh penguasa politik atas dasar hubungan kekeluargaan¹⁰.

Politik keluarga tidak hanya berlaku pada masyarakat desa yang penuh dengan ikatan kekerabatan, akan tetapi dapat berlangsung pula pada masyarakat perkotaan. Eric Wolf dalam studinya tentang arti dan peran keluarga dalam percaturan politik ia menemukan bahwa politik keluarga dapat pula berlaku di beberapa Kota Austria dan Pulau Sicilia¹¹.

Kelompok keluarga yang memiliki lahan yang luas telah mendirikan pabrik yang dikelola dengan system keturunan. Pimpinan pabrik diangkat dari keluarga inti. Politik keluarga nampak ketika terjadi rencana pengalihan lahan oleh pemerintah dalam rangka pelebaran jalan dan perluasan kota. Kelompok keluarga akan

⁷ Ibid,h.9

⁸ Amri marzali. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta.Kencana 2007, h.159

⁹ Claessen, *Op.cit*, h.50

¹⁰ Koentjaraningrat, *Op.cit*, h.139

¹¹ Claessen, *Op.cit*,h.66-67

berkoalisi untuk mempertahankan lahannya. Dimulai dengan mengumpulkan sejumlah harta kekayaan untuk menebus sebagai jaminan kepada pemerintah, sampai pada tuntutan hukum di pengadilan. Bahkan pada tingkat tertentu mereka berkumpul dan berbaris menjadi benteng dan perisai hidup guna mempertahankan lahan pabriknya.

Pelras dalam kajiannya tentang relasi kuasa ponggawa sawi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan menunjukkan kekuasaan ponggawa yang menyebabkan kesetiaan sawi dalam pengelolaan kapal dan pemeliharaan tambak didasarkan atas system kekerabatan bilateral.¹² Pilihan ponggawa terhadap para sawi diutamakan yang bertalian dengan hubungan keluarga karena disamping untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, mereka juga pantang untuk pindah ke ponggawa lain.

Kasus pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa Karang Agung Kabupaten Tuban. Warga desa tersebut hidup dalam polarisasi ideologi keagamaan NU dan Muhammadiyah. Warga NU di desa itu berjumlah 60% sedangkan 40% sisanya adalah penganut Muhammadiyah. NU adalah penganut faham keagamaan dalam Islam yang mempertahankan tradisi dalam praktek keagamaan, sedangkan Muhammadiyah adalah menganut faham yang ingin memurnikan ajaran Islam dari berbagai tradisi. Sebanyak tiga calon kepala desa dari Muhammadiyah dan satu orang dari NU. Secara teoritis perwakilan NU lebih berpeluang untuk memenangkan Pilkades, karena jumlah pemilih NU sebanyak 60% dan tiga calon Muhammadiyah memperebutkan suara 40%. Namun hasil pilkades menunjukkan salah seorang calon Muhammadiyah yang memenangkan pertarungan. Setelah diteliti kemenangan calon Muhammadiyah karena adanya hubungan keluarga¹³

Peristiwa yang terjadi di desa Karang Agung Tuban tersebut menunjukkan bahwa faktor keluarga menjadi pertimbangan utama ketika masyarakat setempat diperhadapkan pada pilihan politik yang berkaitan dengan kepentingan kekuasaan. Ikatan pertalian keluarga mampu mengesampingkan pertimbangan ideologi keagamaan.

V. Politik Segmetar

Dalam system ideologi kekerabatan, system segmentar termasuk yang menjadi topik pembahasan. Ciri utama dari politik segmentar adalah kelompok lokal yang bersatu atas dasar keturunan unilinear (mengikuti suatu garis arah keturunan) atau kepercayaan kepada adanya keturunan yang demikian terdapat oposisi segmentar yang menjadi ciri hubungan antar kelompok.¹⁴

Pada politik segmentar hubungan-hubungan sosial berisikan juga hubungan politik, dimana tidak ada kekuasaan pusat, kekuasaan didistribusikan pada kelompok-kelompok. Hubungan politik dimaknai sebagai hubungan kekerabatan,

¹² R.Siti.Zuhro dkk. *Demokrasi Lokal Perubahan dan kesinambungan nilai-nilai politik Budaya local di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Jakarta.Ombak,2009,h.185

¹³ Nur Syam. *Islam Pesisir*. Yogyakarta,LKiS ,2005, h.201

¹⁴ Claessen, *Op.cit*,h.68

distribusi kekuasaan pada kelompok memungkinkan lahirnya oposisi segmentar yang memberi ciri dalam hubungan politik segmentar. Dalam keadaan tertentu kelompok itu saling bekerja sama namun pada keadaan tertentu kelompok itu saling bermusuhan.

Gejala penting dalam struktur politik segmentar juga dipandang sebagai hubungan kekerabatan. Keseimbangan kekuasaan yang terbentuk antara kelompok tersebut akibat adanya saingan antara mereka. Pada waktu dan keadaan tertentu kelompok-kelompok bekerja sama dan pada keadaan yang lain kelompok itu mereka berkombinasi menghadapi kelompok lain sebagai lawan bermain. Dalam politik segmentar setiap kelompok berdiri sendiri namun pada keadaan lain menjadi bagian kelompok yang lebih besar.

Pada perkembangan politik modern, politik segmentar berlaku pula dalam masyarakat yang kompleks berupa perwakilan politik (partai) yang dikenal dengan istilah koalisi dan oposisi. Partai-partai berkoalisi karena memiliki kepentingan yang sama dalam merebut dan mempertahankan posisi politik, diwaktu yang lain beroposisi secara sendiri maupun dengan partai yang lain menghadapi partai yang lebih dominan. Koalisi dan oposisi politik diperlukan dalam suatu system politik demi menjaga kekuasaan yang cenderung otoriter. Oposisi menjadi lembaga pengontrol kekuasaan yang efektif dalam system politik modern, sehingga dikembangkan istilah yang populer *tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi*.

VI. Penutup

Masyarakat pedesaan hidup dalam tingkat interaksi antara sesamanya secara intensif. Interaksi anggota masyarakat berbentuk kelompok sosial melahirkan perasaan senasib, sepenaggungan, saling membantu dan tolong menolong secara tulus menimbulkan ikatan kekerabatan yang sangat kuat. Namun sifat manusia yang selalu ingin berkuasa dan menanamkan pengaruhnya berhasrat membangun struktur politik pada segmen yang kecil hingga masyarakat Negara. Relasi politik dan kekerabatan tidak menghalangi munculnya persaingan dalam bentuk oposisi dan koalisi berdasarkan hubungan keluarga dan kepentingan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri marzali. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta. Kencana 2007
Kontjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta, 2000
Frank Mc.Glynn dan Athur Tuden. *Anthropological Aproches to Political Behaviour*.
Terjemahan oleh H.J.M. Claessen. *Anthropologie, Een Terrainverkenning*.
Terjemahan oleh R.G. Soekadijo. *Antropologi Politik : Suatu orientasi*. Jakarta.
Erlangga, 1987
R.Siti.Zuhro dkk. *Demokrasi Lokal Perubahan dan kesinambungan nilai-nilai politik
Budaya local di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*.
Jakarta. Ombak, 2000

Nur Syam. *Islam Pesisir*. Yogyakarta, LKiS, 2005

Suwargono dan Nugroho ; *Pendekatan Antropologi pada perilaku Politik*. Jakarta. UI Press 2000

Soerjono Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Zainuddi Maliki. *Narasi agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya. LPAM 2003